

RENJA
(RENCANA KERJA)
KECAMATAN DEKET
TAHUN 2025



RENJA 2025
KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Tahun 2025, Rencana ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPJPD) Kabupaten Lamongan.

Dalam laporan ini kami menyadari akan keterbatasan yang masih jauh dari sempurna, terdapat beberapa kekurangan oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari PD terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Kerja PD Kecamatan Deket Tahun 2025 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan Demikian mudah – mudahan bermanfaat.

Deket, Juni 2025
CAMAT DEKET


ARIF BAKHTIAR, S.Sos
Pembina
NIP. 19811107 200604 1 011

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB 1 PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
TABEL T-C.29.....	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD.....	18
TABEL T-C.30	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Deket.....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Deket	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
TABEL T-C.31.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
TABEL T.C.32	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	29
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
3.3 Program dan Kegiatan.....	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	33
TABEL T-C.33.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB V	39
P E N U T U P	39

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Deket Tahun 2025 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah di mana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasat Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala

Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kecamatan, maka perencanaan kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai Pemerintah daerah.

Dalam Renstra PD Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tetap berpegang pada prinsip Tata Pemerintahan yang baik dan mencakup lima pendekatan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan.
4. Perencanaan Top-Down (atas-bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan bottom-up (bawah-atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stake holder atau jenjang pemerintah di bawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan.

Pendekatan Top Down dan Bottom Up diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan musrenbang.

Rancang Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Deket Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Perubahan Rencana Kerja mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Deket Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Lamongan.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021.
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan daerah NO 5 Tahun 2016.
26. PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodesifikasi, dan nomenklatur, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021.
28. Peraturan Bupati Lamongan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Deket Tahun 2025 berdasarkan Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip **GOOD GOVERNANCE**.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Deket tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis, program-program pembangunan selama tahun 2025 yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab. I Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab. II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD;
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Deket;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab.III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2 Tujuan dan Sarana Renja PD;
- 3.3 Program dan Kegiatan PD.

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab. V Penutup

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Deket telah mengevaluasi Kinerja tahun 2025, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2025, Kecamatan Deket mempunyai program-program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja PD sampai tahun berjalan sebagaimana pada tabel T-C.29 berikut

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Deket sampai dengan Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja renstra skpd tahun 2021	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan pd tahun 2025			Target program/ kegiatan renja PD tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025		catatan
										Target Renja 2025	Realisasi Renja 2025	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan kegiatan 2025	Tingkat capaian	
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 = (10/4)	12
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM			82,26	82,26	100%	85,00			
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang Terlaksanakan			100%	100%	100%	100%			
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang selaras			4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen			
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlaksanakan dengan baik			100%	100%	100%	100%			
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SPJ Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar			14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan			

7	01	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun			4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan			
7	01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran			12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan			
7	01	01	2.05			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terlaksanakan			100%	100%	100%	100%			
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian barang Penyediaan			50 Potong	50 Potong	100%	50 Potong			
7	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor			3 orang	3 orang	100%	3 orang			
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan			100%	100%	100%	100%			
7	01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah barang bacaan dan perundang-undangan			7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis			
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan			23 Jenis	23 Jenis	100%	23 Jenis			
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis			
7	01	01	2.07	07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis			

7	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			300 dus	300 dus	100%	300 dus			
7	01	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar			100%	100%	100%	100%			
7	01	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa servis peralatan dan perlengkapan			2 Item	100%	2 Item	2 Item			
7	01	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor			100%	100%	100%	100%			
7	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan			3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis			
7	01	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis			
7	01	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			7 Orang	7 Orang	100%	7 Orang			
7	01	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung yang di laksanakan			100%	100%	100%	100%			
7	01	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu			1 Kendaraan Roda 4 7 Kendaraan Roda 2	1 Kendaraan Roda 4 7 Kendaraan Roda 2	100%	1 Kendaraan Roda 4 7 Kendaraan Roda 2			

7	01	02	2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang Terlaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			1 Kendaraan Roda 4 7 Kendaraan Roda 2	1 Kendaraan Roda 4 7 Kendaraan Roda 2	100%	1 Kendaraan Roda 4 7 Kendaraan Roda 2			
7	01	02	2.02	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan Publik yang di laksanakan			1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung			
7	01	03					PROGRAM PERBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat			100%	100%	100%	100%			
7	01	03	2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan yang terlaksanakan			100%	100%	100%	100%			
7	01	03	2.01	01			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam musrenbangdes			3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis			
7	01	03	2.01	02			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Desa yang melakukan sinkronisasi			100%	100%	100%	100%			
7	01	03	2.01	03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina			100%	100%	100%	100%			
7	01	03	2.06				pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah desa yang diberdayakan dan disehaterahkan			17 Desa	17 Desa	100%	17 Desa			

7	01	03	2.06	03		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			17 Desa	17 Desa	100%	17 Desa			
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan			100%	100%	100%	100%			
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan			100%	100%	100%	100%			
7	01	05	2.01	03		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah desa yang Melakukan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			17 Desa	17 Desa	100%	17 Desa			
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas			9,52%	9,52%	100%	14,29%			
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100%	100%	100%	100%			

7	01	06	2.01	01		Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			17 Desa	17 Desa	100%	17 Desa			
7	01	06	2.01	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa			17 Desa	17 Desa	100%	17 Desa			
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa			17 Desa	17 Desa	100%	17 Desa			
7	01	06	2.01	11		Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang melaksanakan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			17 Desa	17 Desa	100%	17 Desa			
7	01	06	2.01	18		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang berkoordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan			8 desa	8 desa	100%	8 desa			

Deket, Juni 2025

CAMAT DEKET



APRIL BAKHTIAR, S.Sos

Pembina

NIP. 19811107 200604 1 011

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Tidak Ada

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target Kinerja/Keluaran yang direncanakan : Tidak Ada

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.486.885.589	763.090.026	30,68%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.515.800	0	0%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.862.400	0	0%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.561.800	0	0%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.605.700	0	0%

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target program/kegiatan

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik
Faktor penyebab:
 - Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan di sebabkan kurangnya personil sehingga penyerapan kurang maksimal.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa disebabkan kurang kesadaran pentingnya musrenbang, perencanaan pembangunan kurang maksimal

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra PD adalah:

1. Nilai IKM Internal Kecamatan Deket yang sesuai
2. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu
3. Prosentase Desa Yang Terbina sesuai dengan target
4. Persentase Konflik yang tertangani sudah sesuai target
5. Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan sesuai dengan target
6. Persentase Desa Naik Kelas sesuai target

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perlu adanya penambahan personil di Kecamatan Deket
- Pemenuhan sarana dan prasarana
- Peningkatan disiplin aparatur dibidang seragam
- Memberikan kewenangan penuh kepada Kecamatan untuk mengelola anggaran operasioanl dan anggaran dana pembangunan di Kecamatan.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- Perlu peningkatan kesadaran dan kehadiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan.
- Perlu adanya pembinaan kepemudaan secara kontinyu dan peningkatan sarana dan prasarana yang lebih baik di bidang olahraga.
- Perlu adanya penambahan personil, pembinaan dan sarana prasarana penunjang tugas linmas di desa.
- perlu adanya pembinaan dan bimbingan teknis pada perangkat Desa dalam pembuatan dan penyusunan APBD Desa.
- Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat miskin baik pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.
- Perlu adanya lapangan kerja baru melalui sektor industri dan non industri dengan standart UMK yang memadai dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan secara terprogram dan berkelanjutan.
- Diadakannya kerja bakti secara rutin di sepanjang kali Deket.
- Memberi peringatan kepada pemilik prayang/anco untuk membersihkan enceng gondok secara rutin.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kecamatan Deket dalam menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan Berdasarkan peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Deket, Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan:

CAMAT

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat.

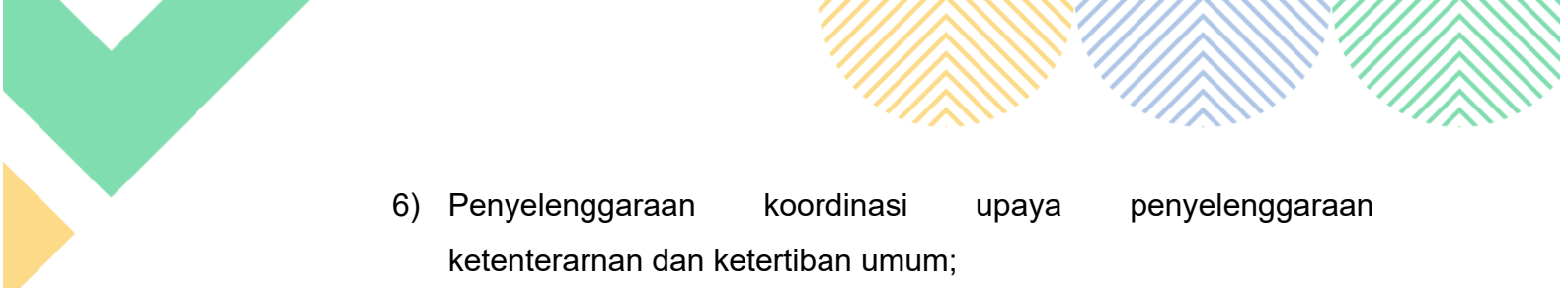
- 1). Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat ;
- 2). Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

b. Mempunyai Tugas :

Camat mempunyai tugas memimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

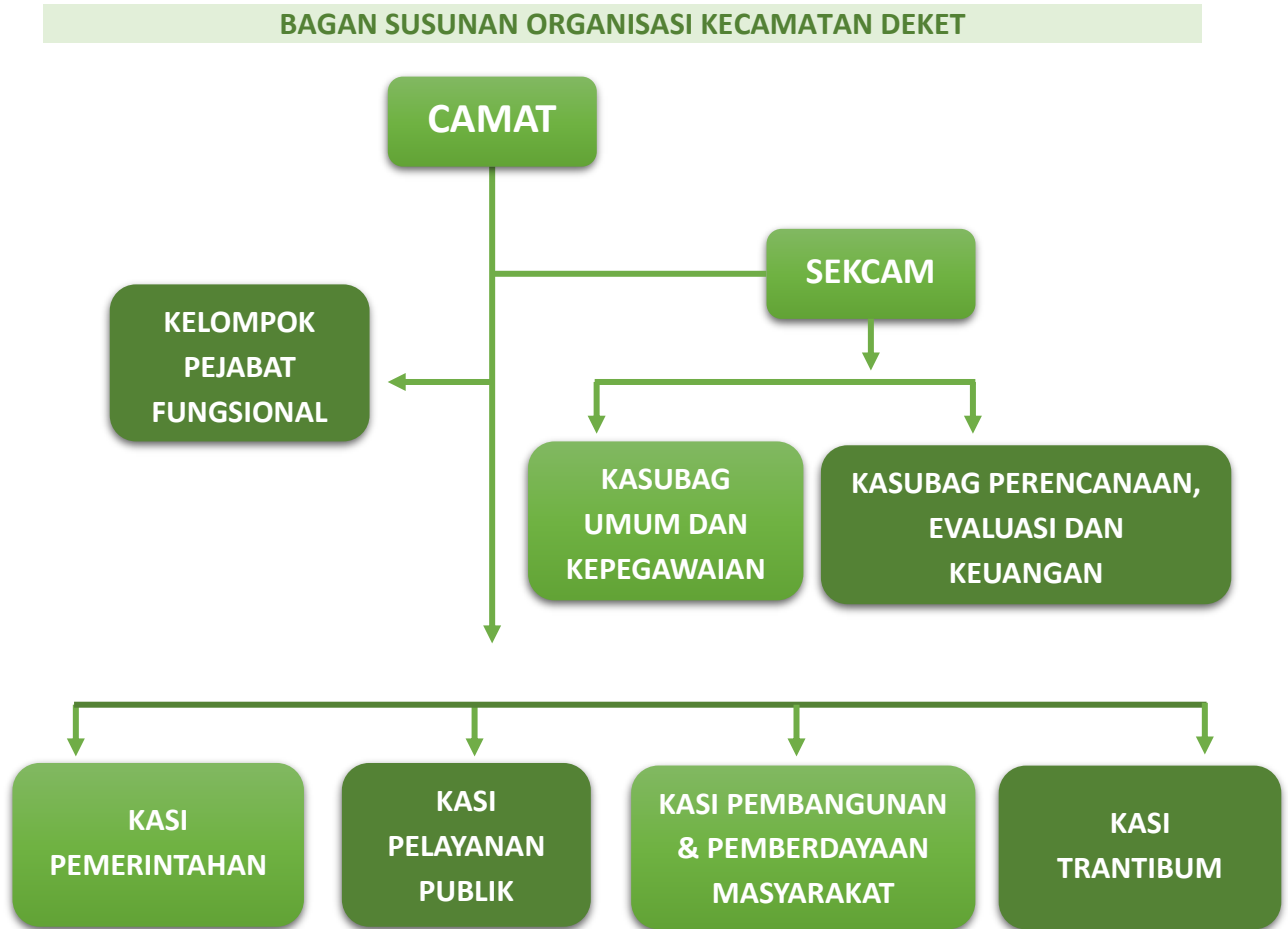
c. Fungsi Camat :

- 1) Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 5) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

- 
- 6) Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 7) Penyelenggaraan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
 - 8) Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
 - 9) Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
 - 10) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 11) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
 - 12) Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 13) Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan
 - 14) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
 - 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan sebagai berikut :



Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Deket sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Deket merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Deket dapat dilihat sebagaimana Tabel T.C.30 sebagai be

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	10	11	12
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif		Nilai IKM	82,26	81,90	82,40	82,80	83,50	83,75	-	81,90	82,40	82,80	82,40	82,80	
			Nilai SAKIP Kecamatan	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
2	Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Peningkatan Desa Mandiri	12%	24%	35%	47%	59%	71%	12%	24%	35%	53%	35%	47%	
			Jumlah Desa Maju	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	3 desa	2 desa	2 desa	



Deket, Juni 2025
 Camat DEKET

ABIL BAKHTIAR, S.Sos
 Pembina
 NIP. 19811107 200604 1 011

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Deket

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Deket dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Deket antara lain:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam tugas-tugas pelayanan belum maksimal disebabkan:

- Gedung dan ruangan kantor masih diperlukan perbaikan

2. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Deket karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.

3. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Deket sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan Jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Deket terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kecamatan Deket terhadap capaian program Pemerintah Kabupaten Lamongan di bidang pemerintahan. Pembangunan, Kemasyarakatan, pelayanan umum dan ketertiban masyarakat.

a. Meningkatnya keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

1. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi muspika, UPT/Instansi, dan kepala desa se-Kecamatan Deket setiap bulan.
 2. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Deket setiap bulan.
 3. Terwujudnya pelaksanaan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa se-Kecamatan Deket setiap bulan.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
1. Melakukan monitoring pendistribusian ranstra
 2. Pelayanan pendistribusian dana BLT, PKH, dan penyaluran bantuan pendidikan BOS kepada para siswa siswi tidak mampu yang berprestasi.
 3. Mengkoordinir penjaringan data Kartu Sehat dan Kartu Pintar
 4. Pelayanan surat permohonan bantuan sarana sosial
- c. Meningkatnya pemberdayaan perekonomian dan pembangunan
1. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, jembatan dan jalan poros desa, pembangunan jalan lingkungan dan balai desa.
 2. Terwujudnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pelaporan.
- d. Meningkatnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat secara prima.
- e. Meningkatnya pelayanan tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan
1. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, rapat staf setiap bulan, melaksanakan SKJ setiap hari jum'at dan apel pagi/sore setiap hari kerja serta evaluasi dan analisa beban kerja.
 2. Mengikutsertakan diklat PIM bagi pegawai yang menduduki jabatan serta pengembangan pengawasan SJPD berbasis kinerja.

f. Meningkatnya pengendalian keamanan dan ketentraman masyarakat di wilayah Kecamatan Deket.

1. Sosialisasi dan penyuluhan peraturan daerah kepada masyarakat.
2. Terwujudnya penanggulangan dan penanganan bencana alam di wilayah Kecamatan Deket.
3. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Deket

Peningkatan pelayanan masyarakat Kecamatan Deket memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal itu diperlukan analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Treats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Deket didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

1. Kekuatan (Strengths)

- Tersedianya jumlah SDM
- Terciptanya hubungan yang harmonis antar instansi pemerintahan dan tokoh masyarakat

2. Kelemahan (weakness)

- Pelayanan masih belum prima
- Sarana dan prasarana yang terbatas
- Administrasi belum tertib

3. Peluang (opportunities)

- Berkembangnya pemukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
- Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan

- Berkembangnya sarana perekonomian
- Kondisi masyarakat yang heterogen
- Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan

4. Ancaman (threats)

- Keamanan dan ketertiban yang rawan
- Bencana alam

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan
6. Program-program lain yang tidak masuk DPA akan diajukan melalui PAK.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawahke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di Tingkat Kecamatan.
4. Menyajikan Tabel T-C.32, sebagai berikut :

TABEL T.C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KECAMATAN DEKET

NAMA PD : KECAMATAN DEKET

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Dlanggu - Laladan (3.700 x 4 M)	Dlanggu	500 x 4 M	1.500.000.000	Poros Potensial Rusak Breat
		Laladan (Dsn. Keduran)	1.700 x 4 M		
2	Dinoyo - Rejotengah (4.900 x 4.5 M)	babatagung	1.200 x 4.5 M	150.000.000	Jalan Poros Potensial Rusak Berat
		Rejotengah	500 x 4.5 M		
3	Laladan - Laladan (1.600 x 3 M)	Sidomulyo (Dsn. Meluke)	0	500.000.000	Jalan Poros Desa Rusak Berat
		Laladan (Dsn. Keduran)	500 x 3 M		
4	Sidomulyo - Weduni (1.900 x 4M)	Sidomulyo (Dsn. Pujut)	350 M	300.000.000	Jalan Poros Desa Rusak Sedang
		Weduni	128 x 4 M		
5	Deketkulon - Sidobinangun	Deketkulon	750 x 3 M	1.500.000.000	Jalan Poros Desa Rusak Sedang
		Sidobinangun			
6	Babatagung - Weduni (2.470 x 2,5 M)	babatagung (Dsn. Babatwetan)	600 x 2.5 M		Poros Potensial Rusak Breat
		Weduni (Dsn. Putat)	700 x 2,5 M		
7	Babatagung - Tukerto (2.400 x 2,5 M)	babatagung (Dsn. Bangsri)	640 x 2,5 M		Poros Potensial Rusak Breat
		Tukkerto (Dsn. Dalit)			
8	Babatagung - Sidobinangun	Babatagung (Dsn. Dagangan)	554 x 3.5 M		Poros Potensial Rusak Sedang

		Sidobiangun (Dsn. Semambung)			
9	Pandanpancur - Rejotengah	Pandanpancur (Dsn. Nginjen)	3.215		Poros Potensial Rusak Breat
		Rejotengah (Dsn. Calungan)			
10	Sidomulyo - Weduni - Gempolpendowo	Sidomulyo	2.950		Poros Potensial Rusak Breat
		Weduni			
		Gempolpendowo Glagah			
11	Pandanpancur - Sarirejo	Pandanpancur (Dsn. Pondok)	2.500		Poros Potensial Rusak Breat
		Sarirejo (Cangah)			



Deket, Maret 2024

ARI BAKHTIAR, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19811107 200604 1 011

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Deket antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2025 oleh Kecamatan Deket adalah :

1. Program Nasional : Pembangunan Sumber Daya Manusia
 2. Program Nasional : Pembangunan Infrastruktur
 3. Program Nasional : Transformasi Ekonomi
 4. Program Nasional : Penyederhanaan Regulasi
 5. Program Nasional : Penyederhanaan Birokrasi
- Program OPD : -

Dari Program Nasional diatas Kecamatan Deket telah mendukung melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kemandirian Desa

Adapun Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah :

1. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Pemberdayaan Desa

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja untuk tahun 2025, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Deket pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

3.2.1. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, ekonomi, sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa se Kecamatan Deket.

3.2.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Deket akan melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

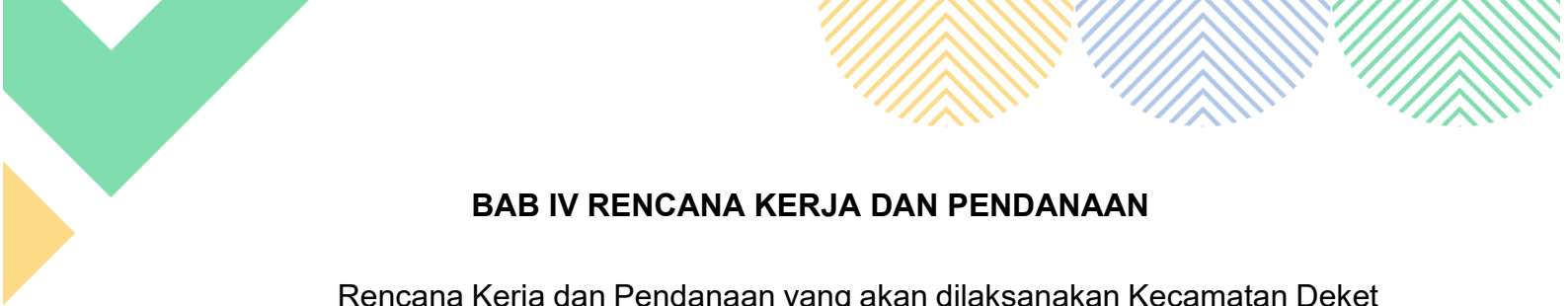
- A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- B. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
- A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2025 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Deket secara keseluruhan pada tahun 2025 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan dan 24 sub kegiatan.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan Kecamatan Deket tahun anggaran 2025 sebagaimana pada Tabel T-C.33 di dibawah ini

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN DEKET TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN PAGU TAHUN 2025

KABUPATEN LAMONGAN

NAMA PD : KECAMATAN DEKET

NOMOR					RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH BERTAMBAH/BERKURANG	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM			
1					2	3	5	6					7	8	9
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	86	2.422.724.280	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	86	2.417.339.889,00	-Rp5.384.391,00		KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	8.589.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	3.527.400	-Rp5.061.700,00		KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.589.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.527.400	-Rp5.061.700,00		KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.089.894.780	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.180.778.589	Rp90.883.809,00		KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Laporan	2.072.107.280	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Laporan	2.174.009.189	Rp101.901.909,00		KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Keuangan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	8.960.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Keuangan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	3.190.100	-Rp5.770.200,00		KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	14 Laporan	8.827.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	14 Laporan	3.579.300	-Rp5.247.900,00		KECAMATAN DEKET

						Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD					
7	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	6.408.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	0	-Rp6.408.000,00			KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	6.408.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	0	-Rp6.408.000,00			KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	77.736.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	58.275.850	-Rp19.460.950,00			KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140 Item	5.953.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140 Item	5.953.500	Rp0,00			KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	13.801.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	13.801.000	Rp0,00			KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	19.441.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	17.128.100	-Rp2.313.700,00			KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	2 jenis	16.952.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	2 jenis	8.055.250	(Rp8.897.250,00)			KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	5.088.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	5.088.000	Rp0,00			KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 dus	16.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 dus	8.250.000	(Rp8.250.000,00)			KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 Item	15.117.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 Item	7.558.600	(Rp7.558.600,00)			KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Item	15.117.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Item	7.558.600	(Rp7.558.600,00)			KECAMATAN DEKET

7	1	1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	164.640.00 0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	123.412.000	(Rp41.228.000,00)		KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Jenis	39.700.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Jenis	39.700.000	Rp0,00		KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Orang	124.940.00 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Orang	83.712.000	(Rp41.228.000,00)		KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	60.338.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	43.787.450	(Rp16.550.950,00)		KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Kendaraan Roda 4 7 Kendaraan Roda 2	3.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Kendaraan Roda 4 7 Kendaraan Roda 2	3.600.000	Rp0,00		KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Kendaraan Roda 4 7 Kendaraan Roda 2	23.636.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Kendaraan Roda 4 7 Kendaraan Roda 2	23.636.500	Rp0,00		KECAMATAN DEKET
7	1	1	2,0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabilitasi	1 Gedung	33.101.900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diehabilitasi	1 Gedung	16.550.950	(Rp16.550.950,00)		KECAMATAN DEKET
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	17.515.800	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	17.515.800	Rp0,00		KECAMATAN DEKET
7	1	2	2,0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100%	17.515.800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100%	17.515.800	Rp0,00		KECAMATAN DEKET
7	1	2	2,0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	3 Jenis	17.515.800	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	3 Jenis	17.515.800	Rp0,00		KECAMATAN DEKET

						Wilayah Kecamatan				Wilayah Kecamatan					
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	53.080.200	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	24.862.400	(Rp28.217.800,00)		KECAMATAN DEKET
7	1	3	2,0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	33.080.200	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	9.302.400	(Rp23.777.800,00)		KECAMATAN DEKET
7	1	3	2,0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 Desa	19.849.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 Desa	Rp0,00	(Rp19.849.800,00)		KECAMATAN DEKET
7	1	3	2,0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	17 Desa	7.905.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	17 Desa	7.905.000	Rp0,00		KECAMATAN DEKET
7	1	3	2,0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Eektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kecamatan	3 Pembinaan	5.325.400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Eektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kecamatan	3 Pembinaan	1.397.400	(Rp3.928.000,00)		KECAMATAN DEKET
7	1	3	2,0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		17 Desa	20.000.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		17 Desa	15.560.000	(Rp4.440.000,00)		KECAMATAN DEKET
7	1	3	2,0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikut Peningkatan Ketahanan Pangan	17 Desa	20.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikut Peningkatan Ketahanan Pangan	17 Desa	15.560.000	(Rp4.440.000,00)		KECAMATAN DEKET
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	5.360.300	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	1.561.800	(Rp3.798.500,00)		KECAMATAN DEKET
7	1	5	2,0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	5.360.300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	1.561.800	(Rp3.798.500,00)		KECAMATAN DEKET

7	1	5	2,0 1	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Keluarga yang Mengikut Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	17 Desa	5.360.300	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Keluarga yang Mengikut Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	17 Desa	1.561.800	(Rp3.798.500,00)	KECAMATAN DEKET
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		23,53%	23.322.100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		23,53%	25.605.700	Rp2.283.600,00	KECAMATAN DEKET
7	1	6	2,0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	23.322.100	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	25.605.700	Rp2.283.600,00	KECAMATAN DEKET
7	1	6	2,0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Desa	7.680.600	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Desa	3.690.600	(Rp3.990.000,00)	KECAMATAN DEKET
7	1	6	2,0 1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 Desa	15.641.500	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 Desa	21.915.100	Rp6.273.600,00	KECAMATAN DEKET
Total								2.522.026.680	Total			2.486.885.589		

BAB V P E N U T U P

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Deket sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Deket merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu Unit Kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

Kaidah – Kaidah pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Deket dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD Rencana tindak lanjut Kecamatan Deket pada tahun mendatang akan menetapkan 5 (Lima) program sesuai dengan program kewilayahan yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025, adapun program dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Deket Tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Deket tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

KAMAT DEKET



ABIF BAKHTIAR, S.Sos
Pembina
NIP. 19811107 200604 1 011